

**Rencana Strategis Kecamatan Taliwang
2025-2029**

Visi

TERWUJUDNYA KSB MAJU LUAR BIASA MENUJU TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMBAWA BARAT

Misi

1. KSB Maju dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Internal Perangkat Daerah
2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel
3. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dengan Pelayanan Umum
6. Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
9. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
11. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
13. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
14. Peningkatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal
15. Peningkatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
16. Peningkatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
17. Peningkatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
18. Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
19. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kebijakan

1. 1. Penyusunan perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu 2. Penyusunan penganggaran yang berkualitas berdasarkan analisis standar belanja dan harga satuan barang 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan kinerja secara berkala 4. Pemanfaatan data capaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. 1. Pemenuhan akan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN perangkat daerah 2. Pelaksanaan pengujian dan verifikasi administrasi keuangan secara terus menerus 3. Koordinasi yang intensif dalam penyusunan dokumen laporan keuangan perangkat daerah
3. 1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah jangka pendek dan jangka menengah 2. Pengadaan barang dan jasa milik daerah perangkat daerah sesuai kebutuhan mendesak 3. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah secara transparan dan akuntabel 4. Penyusunan laporan barang milik daerah secara berkala 5. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah secara berkala
4. 1. Pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara terbuka dan tepat waktu 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai perangkat daerah 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah
5. 1. Penguatan Forum Koordinasi Lintas Sektor 2. Integrasi Sistem Layanan Publik Antar Instansi 3. Penetapan SOP 4. Penguatan Kapasitas SDM dalam Kolaborasi Lintas Instansi 5. Monitoring dan Evaluasi Bersama Layanan Publik 6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Lintas Layanan
6. 1. Penyesuaian dan Implementasi SPM sesuai Regulasi Nasional 2. Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Penerapan SPM 3. Integrasi SPM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran 4. Penguatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 5. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi untuk Monitoring SPM 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar
7. 1. Penyederhanaan Proses dan Prosedur Pelayanan 2. Penguatan Sistem Layanan Berbasis Teknologi Informasi 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kecamatan 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Memadai 5. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengaduan Masyarakat 6. Kolaborasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Mitra Layanan 7. Penetapan dan Sosialisasi Standar Pelayanan
8. 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Penguatan Fungsi Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Kemasyarakatan 3. Optimalisasi Layanan Nonperizinan Berbasis Teknologi Informasi 4. Penyederhanaan dan Standarisasi Proses Pelayanan Nonperizinan 5. Peningkatan Peran Kecamatan dalam Urusan Kebencanaan dan Ketentraman Umum 6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Nonperizinan Secara Berkala
9. 1. Integrasi Program Pemberdayaan ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penguatan Koordinasi antara Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan OPD Terkait 3. Pemaduan Program dari Berbagai Sumber Pendanaan 4. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 6. Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Pemberdayaan 7. Pengembangan Model Pemberdayaan Berbasis Potensi Wilayah
10. 1. Peningkatan Literasi dan Pemahaman Warga tentang Musrenbang 2. Keterlibatan Kelompok Rentan dan Marginal 3. Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 4. Transparansi dalam Proses dan Hasil Musrenbang 5. Transparansi dalam Proses dan Hasil Musrenbang 6. Penguatan Kapasitas Fasilitator dan Pemerintah Desa 7. Pemanfaatan Teknologi untuk Aspirasi dan Informasi Musrenbang
11. 1. Sinkronisasi Program Pemberdayaan antar Instansi dan Lembaga 2. Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Secara Partisipatif 3. Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Lembaga Lokal 4. Peningkatan Peran Kecamatan sebagai Fasilitator dan Pendamping 5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pemberdayaan 6. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Dampak 7. Penguatan Kemitraan dengan Swasta, LSM, dan Perguruan Tinggi
12. 1. Penguatan Pendidikan Keluarga dan Nilai-Nilai Sosial Budaya 2. Revitalisasi Forum-Forum Sosial di Tingkat RT/RW dan Desa 3. Pemberdayaan Kader dan Lembaga Kemasyarakatan 4. Kampanye Publik tentang Ketahanan dan Kepedulian Sosial 5. Peningkatan Akses dan Partisipasi Keluarga dalam Kegiatan Sosial 6. Kolaborasi Antar-Lembaga untuk Membangun Kesadaran Sosial 7. Evaluasi dan Penghargaan bagi Keluarga atau Komunitas Teladan
13. 1. Pengembangan Pangan Keluarga Berbasis Rumah Tangga 2. Edukasi dan Literasi Gizi Keluarga 3. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan UMKM Pangan 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung 5. Peningkatan Akses Informasi Pangan dan Harga 6. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN	1.1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH	1.1.1	Indkes Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Poin					
		1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN	1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Poin					
				1.2.2	Cakupan Desa Mandiri	Persentase (%)					